

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pemerintah pusat dalam meningkatkan sektor manufaktur dan pemerataan ekonomi melakukan beberapa kebijakan salah satunya adalah pembangunan kawasan industri. Kawasan industri adalah usaha industri yang beroperasi terintegrasi di dalam suatu kawasan tertentu diperuntukkan untuk kegiatan industri dan limbah yang dihasilkan diolah secara terpadu (Kodrat, 2011)

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014, bagi penanam modal baru khususnya pada sektor manufaktur diwajibkan untuk membangun pabriknya di kawasan industri. Hal ini telah diterapkan di Provinsi Jawa Tengah. Namun, kawasan industri di Provinsi Jawa Tengah baru terpusat di bagian utara. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini menyiapkan kawasan industri baru terletak di Kabupaten Kebumen.

Rencana pembangunan kawasan industri di Kabupaten Kebumen terdiri dari lima kecamatan yaitu Buayan, Kebumen, Sempor, Gombong, dan Petanahan. Rencana pembangunan kawasan industri saat ini baru diterapkan pada salah satu dari kelima kecamatan yang ada di Kabupaten Kebumen, yaitu Kecamatan Petanahan.

Kecamatan Petanahan terletak dibagian selatan Kota Kebumen. Rencana pembangunan kawasan industri di Kecamatan Petanahan akan mencakup tiga desa yaitu Tegalretno, Karangrejo, dan Karanggadung. Lahan yang akan digunakan untuk kawasan industri sekitar 315 ha merupakan milik negara dan masyarakat

setempat. Lahan milik masyarakat setempat akan dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen melalui kompensasi.

Rencana pembangunan kawasan industri di Kecamatan Petanahan menggunakan lahan pantai yang saat ini masih dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Lahan merupakan salah satu aspek penting dalam pertanian. Karena, lahan difungsikan sebagai tempat manusia untuk mempertahankan eksistensi (Iqbal dan Sumaryanto, 2016). Lahan yang saat ini digunakan untuk kegiatan pertanian akan mengalami alih fungsi menjadi lahan untuk kegiatan industri. Permasalahan ini sudah diketahui oleh petani di Kecamatan Petanahan melalui kegiatan sosialisasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen. Sehingga permasalahan ini akan menimbulkan variasi respon dari petani di Kecamatan Petanahan.

B. Tujuan

1. Mengetahui respon petani terhadap rencana pembangunan kawasan industri di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.
2. Mengetahui hubungan faktor-faktor yang berkaitan dengan respon petani terhadap rencana pembangunan kawasan industri di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.

C. Kegunaan

1. Bermanfaat bagi pemerintah di daerah setempat untuk mengetahui terkait respon petani yang dapat digunakan sebagai acuan dalam rencana pembangunan kawasan industri di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.

2. Menjadi pertimbangan dalam perencanaan kawasan industri dan dapat dijadikan rujukan pemerintah untuk melakukan kompensasi terhadap petani yang terkena dampak dari rencana pembangunan kawasan industri di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.